



CSIS COMMENTARIES

CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. This commentaries serves as a medium for experts to disseminate knowledge and share perspectives in two languages – Bahasa Indonesia and English, enabling a diverse readership to engage with the content. Analyses presented in CSIS Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia. Please contact the editorial team for any enquiries at publication@csis.or.id

CSIS Commentaries CSISCOM01926

October 20th, 2026

Dua Tahun Pemerintahan: Evaluasi Kebijakan Fiskal

Deni Friawan

Peneliti Senior, Departemen Ekonomi, CSIS

deni.friawan@csis.or.id

Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, tekanan terhadap keuangan negara semakin nyata. Pada tahun 2025, defisit APBN mencapai 2,81 persen dari PDB.¹ Hingga September 2026, defisit APBN memang baru 1,24 persen, tetapi diperkirakan akan mencapai 2,85 persen pada akhir tahun, di tengah besarnya beban subsidi energi dan bunga utang.²

¹ Kementerian Keuangan (2026), *Menkeu Apresiasi Capaian Opini WTP LKPP 2025 di Tengah Berbagai Tantangan*. Defisit final hasil audit Rp670,34 triliun atau 2,81 persen PDB. [Sumber](#).

² Kementerian Keuangan (9 Oktober 2026), *APBN Kredibel, Kinerja Fiskal Tetap Terjaga hingga September 2026*. [Realisasi September](#). Kementerian Keuangan (2026), *APBN 2026 Tetap Sehat Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Agenda Prioritas Nasional*. [Proyeksi defisit 2,85 persen](#).

Persoalan utamanya adalah kecenderungan memperlakukan program prioritas presiden sebagai komitmen yang harus terus dibiayai, sementara belanja lain dan berbagai sumber pembiayaan diminta menyesuaikan.

Dampak kebijakan ini tidak hanya berupa misalokasi sumber daya fiskal dalam bentuk pengeluaran yang efektivitasnya masih dipertanyakan, tetapi juga menyempitnya ruang fiskal daerah, tekanan untuk mencari tambahan penerimaan, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan BUMN dan lembaga keuangan negara.

Meski di atas kertas defisit APBN masih berada di bawah batas hukum 3 persen dari PDB, angka defisit tersebut belum memperlihatkan seluruh beban tersebut.

Prioritas Mahal

Perluasan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), ketahanan pangan, dan pertahanan mencerminkan besarnya komitmen pemerintah terhadap program-program unggulan tersebut.

Program MBG, misalnya, menimbulkan banyak masalah ketika ekspansinya melampaui kesiapan pengawasan. Meski memiliki anggaran Rp218,8 triliun pada 2026, kasus keracunan dan makanan tidak layak dikonsumsi masih berulang.³ Hingga Agustus, Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen 504 dapur karena tidak memenuhi standar sanitasi.⁴ Kejaksaan Agung juga menetapkan lima tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan motor listrik senilai Rp1,22 triliun, sementara rencana pembelian layar LED senilai ratusan miliar rupiah dibatalkan.⁵

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) belum diimbangi kesiapan usaha. Dengan alokasi sekitar Rp3 miliar per unit untuk pembangunan dan perlengkapannya, sebanyak 26.661 bangunan dinyatakan rampung hingga akhir September, tetapi baru 1.081 koperasi yang beroperasi.⁶ Sejumlah lokasinya bahkan dipersoalkan karena jauh dari pusat kegiatan ekonomi.

³ ANTARA (17 September 2026), *Program MBG Serap Anggaran Rp139,77 Triliun hingga September 2026*. Pagu program Rp218,77 triliun. [Sumber](#).

⁴ Badan Gizi Nasional (13 Agustus 2026), *BGN Tutup Permanen 504 Dapur MBG yang Tidak Layak*. Siaran Pers SIPERS-293/BGN/08/2026. [Sumber](#).

⁵ Kejaksaan Agung (2 Oktober 2026), *JAM PIDMIL Tetapkan 5 Tersangka Perkara Pengadaan Motor Listrik di BGN*. [Sumber](#). detikNews (3 September 2026), *Kepala BGN Batalkan Pengadaan LED Rp535 Miliar*. [Sumber](#).

⁶ PT Agrinas Pangan Nusantara, dikutip dalam pemberitaan Juli–September 2026. Alokasi Rp3 miliar per unit mencakup bangunan dan perlengkapan. ANTARA (29 September 2026), *Agrinas Pangan Sebut 26.661 Pembangunan KDKMP Selesai 100 Persen*. [Sumber](#). Tirto (29 September 2026), *Agrinas: 1.081 Kopdes Sudah Beroperasi*. [Sumber](#).

Sementara itu, menurut perkiraan anggota DPR TB Hasanuddin, pelatihan calon pengelola Kopdes dan kampung nelayan membutuhkan Rp1,6 triliun, dua pertiganya untuk latihan semi-militer, bukan keterampilan bisnis.⁷ Lima peserta meninggal, sementara 969 calon manajer menolak penawaran penempatan, antara lain terkait lokasi yang jauh.⁸

Pengeluaran besar dengan manfaat yang belum jelas tersebut menimbulkan *opportunity costs*. Setiap rupiah yang digunakan untuk fasilitas yang belum berfungsi dan kegiatan yang dipersiapkan berarti semakin sedikit anggaran tersedia untuk memperbaiki sekolah, layanan kesehatan, dan infrastruktur daerah yang lebih mendesak.

Daerah dan Warga

Perlindungan program prioritas terlihat dalam arah penyesuaian anggaran pemerintah. Pada 2025, efisiensi Rp306,7 triliun mencakup pemotongan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,6 triliun.⁹

Alokasi awal transfer daerah tahun ini yang sebesar Rp693 triliun juga jauh di bawah realisasi Rp849 triliun pada 2025, meskipun sebagian kemudian ditambahkan kembali. Namun, pada Oktober, Menteri Keuangan Suahasil Nazara kembali memerintahkan penghematan 30 persen sisa anggaran perjalanan dinas, dengan tetap menjaga program prioritas.¹⁰

Bagi daerah, pemotongan TKD ini paling mudah diterjemahkan menjadi penundaan pembangunan. Karena belanja pegawai dan kewajiban rutin sulit dikurangi, pagu belanja modal daerah turun dari sekitar Rp213 triliun pada 2025 menjadi Rp152 triliun pada 2026.¹¹ Jalan, irigasi, sanitasi, dan fasilitas umum harus bersaing dalam ruang anggaran yang semakin sempit.

Tekanan APBD ini selanjutnya juga mulai memengaruhi pelayanan dasar. Sebanyak 78 pemerintah daerah memerlukan relaksasi penggunaan dana operasional sekolah untuk

⁷ RMOL (1 Juli 2026), *Penghapusan Latsarmil Calon Manajer Kopdes Hemat Triliunan*. Perhitungan TB Hasanuddin didasarkan pada estimasi biaya Rp45 juta per peserta, termasuk Rp30 juta untuk latihan militer. Angka Rp1,6 triliun merupakan estimasi, bukan realisasi yang diaudit. [Sumber](#).

⁸ SinPo TV (28 Juni 2026), *Kemenhan Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya 5 Peserta SPPI*. [Sumber](#). Tirto (5 Oktober 2026), *Data Agrinas: 969 Manajer Kopdes Tolak Offering, 27.099 Terima*. [Sumber](#).

⁹ Presiden Republik Indonesia (22 Januari 2025), *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025*. [Dokumen resmi](#).

¹⁰ Kementerian Keuangan (2026), *APBN KiTA April 2026*, alokasi awal TKD Rp693 triliun. [Dokumen](#). ANTARA (9 Oktober 2026), *Kemenkeu Instruksikan K/L Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 30 Persen*. [Sumber](#).

¹¹ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, *Portal Data SIKD: Postur APBD Nasional*. Pagu belanja modal 2025 sekitar Rp212,76 triliun dan 2026 sekitar Rp152,07 triliun. [APBD 2025](#) dan [APBD 2026](#).

menggaji guru PPPK paruh waktu.¹² Di Banjarmasin, sekitar 67.000 penerima bantuan iuran JKN dinonaktifkan, yang menurut Ombudsman Kalimantan Selatan terkait dengan penurunan transfer dan efisiensi anggaran.¹³ Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa ketika anggaran terbatas, pemerintah daerah harus memilih di antara berbagai kewajiban yang sama-sama mendasar.

Keterbatasan anggaran juga mempersulit penanganan bencana. Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperkirakan membutuhkan Rp100,16 triliun selama 2026–2028.¹⁴ Ini belum termasuk kebutuhan penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan.¹⁵ Sementara itu, APBN 2026 awalnya hanya mengalokasikan Rp250 miliar Dana Siap Pakai BNPB dan Rp5 triliun cadangan bencana, yang dapat ditambah sesuai kebutuhan.¹⁶

Sebagian transfer kepada daerah terdampak banjir telah dikembalikan, tetapi rehabilitasi infrastruktur dan lingkungan membutuhkan pembiayaan berkelanjutan, bukan sekadar dana tanggap darurat.¹⁷

Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah semakin gencar mencari tambahan penerimaan. Di daerah, rencana kenaikan PBB-P2 di Pati hingga 250 persen memicu demonstrasi.¹⁸ Sementara itu, pemerintah pusat memperketat penagihan pajak dan pemeriksaan restitusi, serta membuka koordinasi dengan aparat keamanan untuk mendukung pengumpulan informasi perpajakan.¹⁹ Ketegasan tersebut seharusnya diimbangi evaluasi yang sama terhadap kebutuhan dan efektivitas belanja.

¹² Investortrust (6 Mei 2026), *Pemerintah Beri Relaksasi Gaji Guru P3K Paruh Waktu bagi 78 Pemda, Berlaku Satu Tahun*. [Sumber](#).

¹³ Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan (22 Januari 2026), *Ombudsman Kalsel: Kebijakan Penonaktifan PBI Jaminan Kesehatan agar Ditinjau Kembali*. Siaran Pers B/0061/PC.02-22/I/2026. [Sumber](#).

¹⁴ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (19 Juni 2026), *Menko PMK Minta Percepatan Implementasi Rehab Rekon Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar*. [Sumber](#).

¹⁵ BMKG (September 2026), *Prakiraan Cuaca Indonesia Sepekan Periode 15–21 September 2026: Atmosfer Kering Mendominasi, Karhutla dan Asap Meluas*. [Sumber](#).

¹⁶ Kementerian Keuangan (Desember 2025), *APBN Responsif Memitigasi Risiko dan Menangani Dampak Bencana, APBN KiTA*. APBN 2026 mengalokasikan Rp250 miliar untuk Dana Siap Pakai BNPB dan Rp5 triliun cadangan bencana. Hingga September 2026, BNPB telah menerima tambahan Dana Siap Pakai sekitar Rp4,63 triliun (ANTARA, 8 September 2026). [Kementerian Keuangan](#); [ANTARA](#).

¹⁷ Kementerian Keuangan (2026), *PMK Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kebijakan Transfer ke Daerah untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat*. [Dokumen resmi](#).

¹⁸ detikNews (8 Agustus 2025), *Bupati Pati Batal Naikkan PBB 250%, Massa Tetap Demo 13 Agustus*. [Sumber](#).

¹⁹ Direktorat Jenderal Pajak (8 Juni 2026), *DJP Perkuat Penagihan Pajak*. [Sumber](#). DDTCNews (15 September 2026), *DJP Tegaskan Pencairan Restitusi Tetap Mengacu pada SOP*. [Sumber](#). DJP, *Keterangan Tertulis Peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas DJP*. [Sumber](#).

Beban di Neraca

Tekanan pembiayaan juga datang dari utang yang harus terus dibiayai kembali. Hingga Juni 2026, utang pemerintah telah mencapai Rp10.294 triliun, sementara anggaran pembayaran bunga setara hampir 19 persen dari target pendapatan negara pada 2026.²⁰ Lebih dari Rp800 triliun utang jatuh tempo tahun ini, di luar kebutuhan menutup defisit.²¹

Di tengah tingginya imbal hasil obligasi global, sejumlah SBN berjangka panjang pada lelang Oktober menawarkan imbal hasil di atas 7 persen.²² Ini menunjukkan kebutuhan *rollover* berisiko semakin mahal dan menekan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang.

Besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah turut meningkatkan peran Bank Indonesia (BI). Hingga September 2026, BI telah membeli hampir Rp300 triliun SBN, termasuk melalui pasar sekunder.²³ Namun, BI juga menghadapi tingginya biaya operasi moneter, dengan BI-Rate 5,75 persen dan SRBI beredar sekitar Rp1.028 triliun, sementara imbal hasil lelang tenor 12 bulan mencapai 6,6 persen.²⁴ Pembelian SBN membantu pembiayaan pemerintah, tetapi biaya penyerapan likuiditas menambah tekanan pada neraca BI di tengah upayanya menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.

Di luar utang pemerintah, penugasan subsidi dan kompensasi juga menambah kebutuhan pembiayaan BUMN. Piutang PLN kepada pemerintah mencapai Rp110,7 triliun pada akhir 2025.²⁵ Hingga Agustus 2026, piutang subsidi Pupuk Indonesia mencapai Rp39,6 triliun, termasuk komponen estimasi, sementara piutang subsidi dan kompensasi Pertamina mencapai Rp166,84 triliun.²⁶

Besarnya piutang pemerintah membebani kas BUMN dan mempersempit ruang pembiayaan operasional, pemeliharaan, serta investasi. Padahal, keandalan layanan tetap membutuhkan pendanaan yang besar.

²⁰ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan (30 Juni 2026), *Posisi Utang Pemerintah*. [Sumber](#). Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan RAPBN 2026*, alokasi pembayaran bunga utang Rp599,44 triliun. [Dokumen](#).

²¹ Investortrust (20 April 2026), *Jatuh Tempo Utang 2026 di Kisaran Rp833,96 Triliun, APBN Masih Kuat*. [Sumber](#).

²² DJPPR Kementerian Keuangan (13 Oktober 2026), *Hasil Lelang Surat Utang Negara pada Hari Selasa, 13 Oktober 2026*. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan untuk seri FR berkisar 7,07–7,31 persen. [Sumber](#).

²³ IDNFinancials (1 Oktober 2026), *BI Tingkatkan Pembelian SBN untuk Tambah Likuiditas September*, mengutip pernyataan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI yang diberitakan Reuters. [Sumber](#).

²⁴ Bank Indonesia (23 September 2026), *BI-Rate Tetap 5,75%*. [Sumber](#). Kontan (9 Oktober 2026), *Outstanding SRBI Turun pada September 2026*, posisi Rp1.028,15 triliun. [Sumber](#). Bank Indonesia (9 Oktober 2026), *Hasil Lelang SRBI 9 Oktober 2026*. [Sumber](#).

²⁵ PT PLN (Persero), *Laporan Keuangan Konsolidasian Audited 2025*, Catatan 16: Piutang dari Pemerintah. [Salinan laporan](#).

²⁶ RMOL (15 Oktober 2026), *Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Bengkak*. [Sumber](#). Bisnis Indonesia (27 Agustus 2026), *Pemerintah Utang Subsidi dan Kompensasi ke Pertamina Rp166,84 Triliun*. [Sumber](#).

Blackout baru-baru ini di Batam yang mengganggu lebih dari 400.000 pelanggan dan kelangkaan BBM di Bali memperlihatkan pentingnya investasi pada keandalan layanan, kapasitas cadangan, dan ketahanan distribusi yang harus tetap dibiayai di tengah tekanan kas perusahaan.²⁷

Pembiayaan pemerintah juga meluas ke lembaga keuangan negara. Kopdes didukung fasilitas kredit bank-bank negara hingga Rp240 triliun, sementara Kementerian Keuangan dan BI berbagi beban bunga program perumahan dan koperasi.²⁸ Skema ini menggeser sebagian kewajiban pembayaran APBN ke tahun-tahun mendatang dan mempersempit ruang fiskal di masa depan.

Akhirnya, dua kali pergantian Menteri Keuangan tidak mengubah pola dasar pengelolaan kebijakan fiskal. Karena skala program prioritas presiden sulit dikoreksi, pemerintah menekan belanja lain, menambah utang, dan menggunakan neraca lembaga publik. Memasuki tahun ketiga, disiplin fiskal menuntut keberanian mengurangi program yang tidak efektif, bukan sekadar menjaga defisit di bawah 3 persen.

CSIS Indonesia, Pakarti Centre Building, Indonesia 10160
Tel: (62-21) 386 5532 | Fax: (6221) 384 7517 | csis.or.id
Please contact the editorial team for any enquiries at
publication@csis.or.id

²⁷ Pemerintah Kota Batam (13 Oktober 2026), *Usai Koordinasi dengan Dirut PLN Batam, Amsakar Pastikan Listrik Batam Kembali Normal*. [Sumber](#). ANTARA (13 Oktober 2026), *Pertamina Minta Maaf kepada Masyarakat Bali karena BBM Langka*. [Sumber](#).

²⁸ Katadata (6 Agustus 2026), *Purbaya: Utang Kopdes Merah Putih Rp240 Triliun Dibayar Pakai APBN, Dicicil Enam Tahun*. [Sumber](#). ANTARA (8 September 2025), *Kemenkeu–BI Menegaskan Burden Sharing Terapkan Prinsip Berhati-hati*. [Sumber](#).